

Pemimpin Birokrasi Pemerintah

Pemimpin birokrasi pemerintah ternyata tidak sama dengan pemimpin entrepreneur. Pemimpin birokrasi pemerintah diikat oleh aturan-aturan kaku hingga bahkan sampai prosedur pelaksanaannya. Berbeda dengan itu adalah pemimpin entrepreneur. Penyimpangan prosedur biasa dilakukan oleh pemimpin entrepreneur, asalkan dengan cara itu mereka mendapatkan keuntungan. Seorang entrepreneur tidak pernah mau rugi.

Mestinya pemimpin jenis apa saja seharusnya mengejar prestasi, yaitu mampu menggerakkan organisasinya hingga diperoleh efektifitas dan efisiensi. Untuk mendapatkan prestasi itu, seorang pemimpin harus mampu bekerja secara cepat, murah, tetapi hasilnya berkualitas. Tiga hal tersebut harus dipadukan, sekalipun sangat sulit dijalankan.

Biasanya di mana dan kapan pun, pekerjaan yang dikerjakan secara cepat hasilnya tidak berkualitas. Demikian pula, pekerjaan yang dijalankan dengan biaya murah, maka hasilnya juga asal-asalan. Waktu yang singkat dan apalagi biaya tidak mencukupi, maka selalu dijadikan alasan rendahnya kualitas yang dihasilkan. Aggapan orang pada umumnya, bahwa kualitas kerja harus ditopang oleh ketersediaan waktu dan biaya yang cukup.

Namun pemimpin yang hebat harus bisa meraih hasil berkualitas tinggi sekalipun dengan waktu yang pendek dan biaya murah. Memang pekerjaan apa saja akan mudah dilakukan ketika waktu dan biaya yang tersedia mencukupi. Namun pemimpin tidak selalu menemui keadaan yang ideal dan menguntungkan seperti itu.

Rupanya pemimpin birokrasi pemerintah sekarang ini tidak terlalu dituntut seperti itu. Birokrasi pemerintah berorientasi atau berbasis anggaran. Manakala tersedia anggaran maka pekerjaan bisa diselesaikan dan sebaliknya, tanpa anggaran maka boleh-boleh saja pekerjaan tidak dijalankan. Pejabat pemerintah pada level tertentu tidak perlu sibuk-sibuk berupaya mencari dana tambahan, sekalipun hal itu memungkinkan dilakukan.

Itulah sebenarnya titik lemah birokrasi pemerintah sekarang ini. Pemimpin birokrasi pemerintah tidak boleh kreatif. Rasanya memang aneh. Tetapi itulah pada kenyataannya. Keputusan pemimpin birokrasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan anggaran yang tersedia, sekalipun menguntungkan terhadap negara, akan dianggap salah.

Anehnya, sekalipun sebenarnya menyimpang, suatu keputusan justru ditoleransi dan dianggap benar asalkan secara formal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penyimpangan itu misalnya, menambah kemahalan biaya kegiatan. Menurut akal sehat, semua kegiatan harus dilakukan seefisien mungkin. Tetapi usaha itu justru disalahkan kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebaliknya, dibolehkan melakukan kegiatan berbiaya mahal asalkan memenuhi prosedur, dan bahkan itulah yang dianggap betul.

Sebagai contoh konkret, bahwa kegiatan rapat dinas akan lebih murah jika dilakukan di kantor masing-masing. Akan tetapi, strategi itu justru disalahkan kalau tidak sesuai dengan aturan. Sebaliknya, rapat dinas itu boleh dilakukan di hotel mewah di luar kota, asalkan sesuai prosedur, sekalipun berbiaya mahal.

Pendekatan taat prosedur seperti itulah yang memungkinkan orang melakukan korupsi atau penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Akibatnya, biaya birokrasi menjadi mahal dan penuh dengan nuansa korup. Jika hal seperti ini tetap dijalankan, maka sehebat apapun KPK, polisi, dan kejaksaan, maka penyimpangan akan tetap berjalan.

Seorang pemimpin mestinya harus cerdas dan kreatif. Namun sayang pada saat sekarang ini, prinsip itu, terutama di birokrasi pemerintah, belum bisa dijalankan. Birokrasi pemerintah masih mengutamakan prosedur, sekalipun berakibat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pelakunya. Birokrasi seperti itu akan boros dan tidak akan memuaskan masyarakat. Jika ingin maju, maka mestinya dibangun entrepreneur birokrasi. *Wallahu a'lam.*